

ANALISIS PENERAPAN PP 23 PADA KPRI PERGU SINGOSARI TAHUN 2019-2021

Anita Rohmawai¹, M Sodik², Zainudin³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :
anitarahmawati9279@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :
hmsodik@yahoo.co.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :
zponcolimo@gmail.com

Presenting Author: anitarahmawati9279@gmail.com;

*Corresponding Author: anitarahmawati9279@gmail.com

Abstrak

Haluan observasi yakni untuk mengetahui hasil PP 23 yang diterapkan terhadap Koperasi Pergu. Dan apa pengaruh PP 23 terhadap penghasilan koperasi Pergu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang terjun langsung ke tempat usaha yang sesuai dengan karakter tesis yang angkat peneliti maka dari itu di beri nama sebagai kualitatif deskriptif. Bahan yang dipakai dan yang sudah sesuai yaitu pengamatan terjun langsung ke dalam usaha .dari pihak KPRI Pergu catatannya berupa informasi laporan keuangan RAT tahun 2019 – 2021. Ada juga hasil yang didapat di skripsi di dunia maya dan menyongkong keberhasilan dalam usaha akhir ini. Untuk kesempurnaan penjabaran tugas bahwa pada tahun 2019 PP 23 masih belum diterapkan dan menggunakan PP 46 tahun 2013 dikarenakan masih belum menyeluruhnya sosialisasi PP 23 diKPP setempat. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.781.599.892**, Pada tahun 2020 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari-desember. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.612.826.630**, Pada tahun 2021 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari-desember. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.648.734.501**

Kata Kunci: PPh Final, PP 23

Abstract

The purpose of the research is to find out the results of PP No. 23 which is applied to Pergu cooperatives and what is the effect of PP No. 23 on the income of cooperatives. This type of research uses qualitative research. Based on the characteristics raised by is classified as a qualitative descriptive study. The data used in this study is primary data obtained by direct parties from KPRI data in the form of information on the 2019 – 2021 RAT financial statements. While for secondary data obtained from journals, internet and other media that support this research. From the results of the analysis that in 2019 PP No. 23 has not been implemented and uses PP 46 of 2013 because there is still not comprehensive socialization of PP 23 with revenues of 1,781,599,892. In 2020 KPRI has implemented PP number 23 January-December with revenues of 1,612,826,630. In 2021 KPRI implemented PP number 23 January-December with revenues of 1,648,734,501.

Keywords: PPh Final, PP 23

PENDAHULUAN

Pembangunan atau pelaksanaan proyek di wilayah yang maritimisme sekarang bermaksud menaikkan kesentosaan kekerabatan paguyuban. Keberhasilan rekonstruksi suatu proyek membutuhkan anggaran besar jadi satu ketentuan untuk dapat direalisasikan. Opsi ini bisa di buat membikin jadi perolehan nomer satu pungutan perbisnisan lokal atau antar bangsa . pengakuan dari bagian tarif yang diambil kemudian di taruh dalam uang negara akan bisa di buat sebagai penghasilan utama penerimaan dari suatu tanah air yang kan di butuh kan menjelang memenuhi seluruh keperluan negeri.

Pelaksanaannya berupa pembinaan fisik, material dan spiritual. Pemerintah harus memperhatikan sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan. Perusahaan ini menghasilkan sumber daya alam yang diolah oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah. Pemerintah mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber daya alam, pendapatan ekspor dari pariwisata, dan sumber lainnya. Perusahaan pengelola memungut pajak untuk pengelolaan sumber daya alam.

Pada dasarnya pajak adalah iuran yang dapat dibayar oleh yang wajib membayarnya, dan tidak diberikan jaminan bahwa uang tersebut digunakan secara efektif atau akan dikembalikan kepada orang yang membayarnya. Pajak merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk memberikan sebagian dari kekayaannya sendiri kepada masyarakat dalam rangka membantu bangsa dan negara. Ada berbagai macam pajak yang dipungut di Indonesia, tergantung daerahnya. Pajak pusat dapat dibagi atas cukai induk penjualan & penggunaan dan bea area. Pajak daerah terbagi atas retribusi penjualan dan pajak properti t e x a s.

Pelaksanaannya berupa apa yang disebut pembangunan yang intensif secara fisik atau benar-benar menggunakan materi dan materi spiritual. Pemerintah harus memperhatikan sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan. Perusahaan ini menghasilkan sumber daya alam yang diolah oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah. Pemerintah mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber daya alam, pendapatan ekspor dari pariwisata, dan sumber lainnya. Perusahaan pengelola memungut pajak untuk pengelolaan sumber daya alam.

Pada dasarnya pajak adalah iuran yang juga dapat dibayar oleh mereka yang benar-benar berkewajiban untuk membayarnya, dan tidak ada jaminan yang akan diberikan kepada uang tersebut untuk digunakan secara lebih efektif atau ada jaminan bahwa uang itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. orang yang wajib atau wajib membayarnya . . atau kabinet pemimpin kawasan cara lain agar bisa memberikan sebagian kekayaannya sendiri kepada rakyat dalam rangka memperjuangkan dan mampu menegakkan serta membantu perekonomian bangsa dan negara tercinta, salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ada berbagai macam pajak yang dipungut di Indonesia, tergantung daerahnya. Pajak pusat dapat dibagi menjadi pajak pusat penjualan dan penggunaan dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi pajak penjualan untuk pedagang dan pajak properti untuk pengembang atau pajak properti.

Koperasi adalah suatu organisasi dapat di namakan dengan komponen terpadu dari alam bisnis yang benar-benar memiliki letak kapasitas , dan peran atau semangat yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan suatu tujuan atau sasaran pembangunan ekonomi negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU no. 25 tahun setelah Masehi tetapi bukan tahun Islam yaitu warsa seribu sembillan rattus sembilan pulllluh duahhh Koperasi termasuk badan usaha yang usahanya terdiri dari sekelompok orang/orang yang dikelola atas dasar asas yang sangat erat, yaitu kekeluargaan. Perbedaan antara suatu badan dengan perusahaan/usaha lain adalah koperasi yang berlandaskan nilai-nilai dengan prinsip untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan anggota badan usaha yaitu koperasi.

Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, perhitungan pendapatan, arus kas, dan perubahan ekuitas harus disusun oleh badan usaha koperasi lainnya. Koperasi wajib membayar pajak kepada negara sebagai badan usaha. Koperasi pada umumnya harus

mendaftarkan NPWP atau PKP, mengajukan dan melaporkan pajak penghasilan badan koperasi dan/atau memungut PPN.

Beberapa tahun terakhir ini dunia dihebohkan dengan penyakit mematikan sehingga sangat menular sehingga terjadi wabah lock down dari kota yang bernama Wuhan di China, wabah tersebut bernama Covid-19, dimana pandemi tersebut menimbulkan banyak kerugian. terhadap sektor-sektor yang ada . , dengan itu. Wabah covid yang berasal dari kota wuhan sangat merugikan industri yang ada, sehingga banyak masyarakat yang mulai merugi dan tidak mampu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keutamaan setoran perponding jadi sangat mencekik. Pemerintah menyikapi kejadian tersebut dengan mengeluarkan sebuah inovasi atau solusi yang sangat baik yaitu mengeluarkan peraturan baru dengan segala pertimbangan yaitu Perppm Nomer dua puluh tiga waktu dua ribuh delapan belas di berlakukan pada tanggal ganjil pada bulan tujuh tepatnya 1 di 2018 dengan laju power train 0,5%. . setelah saya mengerjakan kolom latar belakang bisa di jabarkan dengan tajuk "**Analisis Implementasi PP 23 di KPRI Pergu Koperasi Singosari Tahun 2019 - 2021**"

Kajian Pustaka

Pajak

Mengikuti seorang ahli yang mempunyai nama bapak sumitro (duaribulimabelas:duapuluh) pajak adalah iuran/pengumpulan dana dari manusia yang berada dalam suatu organisasi yang disebut dengan negara manusia, rakyat adalah rakyat. Hukum yang diperoleh secara paksa, tanpa menerima imbalan jasa atau timbal balik (counter-achievement) yang dapat/dapat langsung ditunjukkan dengan digunakannya untuk membayar pengeluaran umum suatu negara yang dapat disebut negara konoha. Kontribusi ini digunakan untuk menutupi biaya umum

Pajak Penghasilan

Menurut (Waluyo , 2017), pajak penghasilan sebelum atau tidak diubah dari peraturan Uu pajak pendapattan tahun sembilan belas delapan tiga dan telah diubah dengan uUNo. 36 Tahun 2018. Pancasila dan Filosofi UUD biasanya di baca pada saat upacara bendera pada pagi hari di sekolah pada hari senin Tahun 1945 merupakan dasar dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Final (PPh Pasal 4 Ayat 2) PPh merupakan iuran atau pajak yang bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain untuk menentukan besarnya iuran pajak yang terutang.

PPh Pasal empat Ayat dengan nomer 2

merupakan pajak akhir , maka tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dijadisatukan bersama penghasilan lain untuk menentukan besarnya iuran yang belum lunas.

Peraturan Pemerintah No. 46

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan", Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sama dengan tahun takwim, tahun pajak adalah 1 masa kalender. Pajak penghasilan yang bersifat final berlaku bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan usaha. Wajib Pajak yang disebut peredaran bruto tertentu adalah mereka yang memang benar dan memang telah dipilih serta telah memenuhi salah satu syarat sebagai berikut (PP No. 46, 2013):

- a. sebuah. Orang perseorangan atau rekanan bukanlah suatu bentuk usaha tetap.
- b. Memiliki usaha yang memiliki penghasilan usaha, tidak termasuk tunjangan/penghasilan dari jasa lepas atau pekerjaan sampingan, dengan omzet atau penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu kali revolusi bumi atau yang disebut dengan 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018, peraturan laki-laki ini berlaku mulai 1 Juli 2018 Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018):

Wajib Pajak yang dapat dikenakan PP 23 antara lain:

sebuah. Pungutan fardhu perorangan ;

b. Perjak harus Badana antara lain;

1) CV dan firma berdasarkan buku-buku non-agama, yaitu Undang-undang Hukum Dagang .

2) PT Berbasis Undang” Nomor empat puluh Tahun dua ribu tujuh tentang Perseroan Terbatas, dengan pelaksanaannya sekalian

3) Perkoperasian berdasarkan Undang undang Nomor ganjl tepatnya duapuluh5 Tahun 92 tentang Perkoperasian, plus aturannya yang harus dimulai dengan baik pada saat pelaksanaannya.

Mereka yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 juta dalam satu tahun anggaran atau memperoleh penghasilan.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Tri Sukma melati Suci , Herman Karamoy , & Sintje Rondonuwu (2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Manado”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Perbedaannya terletak pada variabel, objek, dan metode penelitian.
2. Miftah Fauzi , & Yeti Apriliawati (2021). Berjudul “Analisis Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus Kpp Pratama Kuningan)”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Perbedaannya terletak pada variabel, dan metode penelitian.
3. Efrinal , & Putri Fitrilia Ariyanti (2021). Berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Terhadap Pelaksanaan PP 23 Th. 2018 Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jat nagara Periode 2021)”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Perbedaannya terletak pada variabel, objek, dan cara buat tESISnya.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan penelitian langsung dan menjelaskan apa yang ada dalam penamatan obyek. Sumber data ini menggunakan data internal pihak Singosari Koperasi Pergu yang dijadikan dasar penelitian. Data yang digunakan adalah data yang di dapat dengan cara terjun langsung ke tempat usaha yang di amati.

Teknik analisis data

1. Menganalisis laporan keuangan dari Koperasi Pergu dan menghitung PP 23.
2. Melakukan perhitungan pajak terutang koperasi yaitu PP 23 pajak final dengan ketentuan Pp Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.
3. Melakukan analisis perhitungan pajak Koperasi Pergu dan laporan keuangannya yang dapat mempengaruhi pendapatan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1

Perhitungan PP 46 Pada Tahun 2019 & Perhitungan PP 23 Pada Tahun 2020-2021

No.	Bulan	Penghasilan Bruto Tahun 2019	Tarif 1%	Penghasilan Bruto tahun 2020	Tarif 0,5%	Penghasilan Bruto tahun 2021	Tarif 0,5%
1	Januari	148.658.500	1.486.585	156.789.023	783.945	156.890.380	784.452
2	Februari	160.689.000	1.606.890	145.678.800	728.394	145.678.902	728.395
3	Maret	165.000.234	1.650.002	134.654.789	673.274	112.908.762	564.544

4	April	110.989.000	1.109.890	155.926.030	779.630	110.789.635	553.948
5	Mei	134.798.600	1.347.986	111.458.789	557.294	143.567.890	717.839
6	Juni	162.423.087	1.624.231	111.349.234	556.746	134.789.345	673.947
7	Juli	138.927.509	1.389.275	123.458.562	617.293	156.702.300	783.512
8	Agustus	145.898.900	1.458.989	123.489.098	617.445	147.866.700	739.334
9	September	127.998.072	1.279.981	133.456.790	667.284	112.455.680	562.278
10	Oktober	167.000.090	1.670.001	145.678.790	728.394	145.455.800	727.279
11	November	166.219.000	1.662.190	132.989.630	664.948	144.234.565	721.173
12	Desember	152.997.900	1.529.979	137.897.095	689.485	137.394.542	686.973
Total		1.781.599.892	17.815.999	1.612.826.630	8.064.133	1.648.734.501	8.243.673

Sumber : RAT KRPI Pergu Tahun 2019-202

Interprestasi tabel diatas dapat dilihat dari:

- segi penerapan dan perhitungan PP 23
 1. dari tabel diatas dapat dilihat baha pada tahun 2019 PP 23 masih belum diterapkan dan menggunakan PP 46 tahun 2013 dikarenakan masih belum menyeluruhnya sosialisasi PP 23 diKPP setempat. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.781.599.892**
 2. Pada tahun 2020 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari- desember. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.612.826.630**
 3. Pada tahun 2021 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari-desember. Dengan pendapatan sebesar **Rp 1.648.734.501**
- pengaruh tarif PP 23
 1. Pada tahun 2019 tidak diterap PePe 2tiga tetapi diterapkannya PePe 4enam taon 2013 dengan tarif satu persen dari omset perbulan. Nominal pajak sebesar **Rp 17.815.999**
 2. Pada tahun 2020 telah diterapkannya PP yang sama yaitu 23 dengan tarif 0.5 persenn dari omset perbulan. Dengan jumlah pajak sebesar **Rp 8.064.133**
 3. Pada tahun 2021 telah diterapkan PP 23 dengan tarif 0.5% dari omset perbulan. Dengan jumlah pajak sebesar **Rp 8.243.673.**

Berdasarkan hasil penelitian pajak penghasilan KPRI Pergu Singosari pada tahun 2020 – 2021 menerapkan pajak pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP tentang penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto Rp 4,8 M sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2018

Pembahasan

TARIF Penghasilan

Uu pasal 1 dengan nomer tiga6 Tahun 2008 menyatakan bahwa dari pendapatan yang diperoleh /diterima masih dalam waktu revolusi bumi /TH pjk , subyek dikenakan pajak omzet . Sejumlah uang yang dterima dari orang pribadi , badan hukum, atau jenis usaha lain yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti membelanjakan, mengumpulkan, dan meningkatkan keayaan disebut pendapatan . Untuk pajak koperasi pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu termasuk:

- a. PPh yang dsebut juga dengan pasal 4 ayat 2 pada hakikatnya adalah pajak yang dipungut dengan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diterimawajib pajak selama satu tahun pajak yang sedang berja;an. Surat pemberitahuan, penghasilan ndak di padukan bersama pendapatan lain yang dihitung jumlah umum dalam pp pinal. Bayaran buat memungut dan merawat gaji

tidak bisa diminuskkan dalam pajak penghasilan final. Pihak yang dipotong dan/atau dipungut serta tidak dapat dihitung dengan menggunakan bukti pemotongan.

Pajak Penghasilan Final

Mencuruk Pajak penghasilan adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak UKM.

1. Dasar Pengenaan Tarif

Omset bulana dikalikan dengan nominal PePeHa final satu persen di bagi 2 jadi 0.5 persen adalah dasaran pengambilan uang wajib rakyat yang digunakan untuk menghitung PPh final. Tergantung pada ketentuan undang-undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, pajak yang dibayarkan atau terutang diluar negeri atas diterima dari luar negeri dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

2. Kompensasi PPh Final

- Berulang di tahun berikutnya berulang kembali dan berlanjut samapai pajak limatahunan pajak, kerugian akan dikompensasikan.
- Dalam tahun pajak dimana pajak penghasilan final dikenakan, kerugian tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

Analisis PP 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah 1 Juli 2018 berlaku, peraturan baru yang dikenal dengan PP 23 yang memungkinkan ajib pajak UMKM untuk menfaatkan tarif yaitu 0,5% yang pendapatanya tidak melebihi Rp4,8M tarif tersebut lebih rendah dari PP 46. Yang berubah menjadi 0,5% dari peredaran bruto selama 1 periode.

Keinginan pemerintah untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak UMKM, termasuk koperasi dan badan, dengan rasa keadilan mendorongnya untuk menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5%. DJP menerapkan gagasan pemilahan penilaian yang lebih lugas, tarif pungutan lebih rendah dan gagasan yang lebih sederhana dan mudah untuk beban tugas pribadi konklusif. [edoman dan beban pengeluaran pribadi konklusif benar-benar direncanakan untuk memberikan akomodasi kepada warga negara dalam mematuhi tugas mereka, ini merupakan hal yang wajar jika warga nrgara mematuhi kewajibannya untuk meningkatkan pembayaran pajak.

PPh adalah cara sederhana untuk memungutt pajak penghasilan. Dikatakan sederhana karena wajib pajak dengan cepat menghitung pajak dengan mengalikan penghasilan bruto wajib pajak sebesar 0,5%. Namun ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak memiliki pilihan untuk mengikuti tarif dengan skema final sebesar 0,5% atau menggunakan skema normal yang ditunangkan di UU NO. 36 tahun 2008.

Analisis PP 46

Perusahaan dengan pendapatan gaji kotor dibawah Rp 4,8M rupiah dikenakan tarif dikenakan tarif 1% dari pendapatan bruto berdasarkan peraturan tersebut. oleh karena itu perusahaan harus melaporkan pendapatannya setiap bulan. Jika pedaaan tersebut ternyata dibawah PR 4,8 M maka dinekan 1% dari pendapatan bruto, tentu perusahaan sangat diuntungkan dari tarif ini. Berikut ini adalah tujuan dari PP 46:

1. Dapat memudahkan orang pribadi dan badan usaha untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fakta bahwa penerimaan pajak dapat mempengaruhi pembangunan nasional dan melani kepentingan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang diperoleh sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa

- a. Pada tahun 2019 KPRI Pergu tidak menerapkan PP 23, namun tetap menerapkan PP 46 dengan tarif 1% dari omzet bulanan.
- b. Pada tahun 2020-2021 KPRI Pergu telah menerapkan PP 23.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, nasehat wajib pengamat :

sebuah. Pembelajaran sesudah saya supaya lebih mengembangkan pembahasan isi dari apa yang di kerjakan dengan mengembangkan variabel dan objek penelitian di bidang perpajakan atau dengan adanya peraturan perpajakan yang baru.

b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas lebih dalam tentang peraturan perpajakan selanjutnya.

c. Bagi koperasi untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Dari tahun ke tahun untuk melengkapi laporan keuangan.

d. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPP untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan, konsultasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk profesionalisme perangkat kerja dan sistem manajemen/manajemen dalam hal kinerja rekening representatif (AR) yang berfungsi menjembatani KPP dengan wajib pajak.

REFERENSI

Analisis Perbandingan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Degan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan. (14 Januari 2022). *Argo Putra Prima & Ferdila*.

Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Dikabupaten Jenepomto. (vol. 4, 1 Mei 20221). *Hartini Lestari, Mursalim Laekeng, Andi Nurwanah*.

Jamaludin, M. (2011). *Pengantar Perpajakan*. Makassar: Alaudin University Pres.

Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. (2018). *Noor safira, Akhmad Soehartono, Agung Baruna Setiawan Noor*.

Miftah Fauzi & Yeti Aprialiawati. (2021). Analisis Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus KPP Pratama Kuningan). *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*.

Republik Indonesia . (2008). Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan . *Jakarta*.

Republik Indonesia . (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta*.

Republik Indonesia . (Tahun 2008). Undang-Undang Republik Indonesia No.20. *Tentang Usaha Kecil Menengah*.

Tri Sukma Melati Suci, Herman Karamo & Sintjie Rondonuwu. (2019). Efektifitas Penerepan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Final Pada KPP Pratama Manado . *Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS.

Sugiono. (2014). *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA. Bandung.

Sugiono. (2017). *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA. Bandung.

Aisyah, Sitti. 2019. Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. *Accumulated Journal*, Vol 1 No. 1.

Ariani, Putu Desy. 2017. Perhitungan Dan Prosedur Pph Pasal 4 Ayat 2 pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol 8

RAT. Laporan buku Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KPRI Pergu Singosari Tahun Buku 2021.